

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA
MASYARAKAT DALAM SITUASI PENDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik)**

Gregorius Tarsan, Novita Maulida Ikmal

Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra

jelahuttrasi@gmail.com¹, novitamaulidaikmal@uwp.ac.id²

Abstrak

Awal tahun 2020 pandemi Covid-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintah di dunia kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi dampaknya. Salah satu dampak dari pandemi ini adalah faktor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat dari pandemi ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan realokasi anggaran yang ada. Dan salah satu realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah Dana Desa.

Dana Desa yang sebenarnya dipergunakan untuk pembanguan Desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana-Desa). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik berdasarkan temuan peneliti lapangan menunjukkan kriteria efektivitas dalam teori Budiani (2017) sudah mencapai tujuan yang diharapkan.

Efektivitas dari Program BLT ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas Program BLT.

Abstract

At the beginning of 2020 the Covid-19 pandemic became a world problem all governments in the world were overwhelmed but continued to try to overcome the spread of this virus, as well as overcome its impact one of the impacts of this pandemic is the economic factor in Indonesia, there is no exception, due to the pandemic this is an effort made by the Indonesian government is to reallocate the existing budget. And one of the budget allocations carried out by the Indonesian government is the village fund. The village fund which is actually used for village development is converted into a cash transfer fund called the Village Fund Direct lunar Assistance (BLT Dana Desa). The effectiveness program in Pengalangan village, Menganti District, Gresik regency based on research findings in the field shows that the effectiveness criteria in Budiani's theory (2017) have achieved the expected goals.

The effectiveness of the BLT Program, especially for the poor, is very beneficial for them, and some people support the program carried out by the central government.

Keywords: effectiveness of the BLT program.

Pendahuluan

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 (dua) kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Dalam kondisi seperti ini, virus corona merupakan suatu wabah yang tidak bisa dianggap biasa saja. Jika dilihat dari gejala orang yang terinfeksi, orang yang belum paham virus ini akan mengiranya hanya sebatas influenza akan tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia (Yunus, 2020). Adanya wabah Covid-19 menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi COVID-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.

Untuk saat ini, dampak COVID-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah COVID-19 juga bisa merebak di desa. Adanya Covid-19 membuat pemerintah menentukan kebijakan untuk menanggulangi perekonomian masyarakat, Salah satu program dari Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang berjenis uang tunai kepada masyarakat miskin termasuk yang terkena dampak pandemi COVID-19, mekanisme pendataan dilakukan oleh RT, RW, Kepala Dusun.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak COVID-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Parapat, A. Z 2020). Dana APBN dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai yang dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi sehingga tidak dapat memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada serta dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan pemotongan, penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu Maun, C. E. (2020). Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan.

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun untuk kebutuhan BLT-D, dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga Asmanto (2020). Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Tunai. Firman, S. (2020) Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan

implementatif Bantuan Langsung Tunai (BL T) kepada penduduk miskin di desa. Wilantara, I. W. (2020)

Tentunya Pemerintah Desa diperlukan kesiapan dan kesigapan untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic COVID-19. Dampak besar yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti yang dialami oleh masyarakat yakni, menurunnya pendapatan masyarakat, dimana Negara membatasi untuk melakukan kegiatan dengan cara: pekerja dirumahkan bahkan sampai di-PHK, para petani tidak dapat menjual hasil kebun karena berkurangnya pembeli. Itulah beberapa dampak yang penulis dapatkan dilokasi penelitian yang dapat melemah akses ekonomi.

Masyarakat desa pengalangan kecamatan menganti sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya jual dikota Surabaya seperti, jagung, padi dan hasil lainnya. Maka dari itu untuk menanggulangi hal ini, pemerinta memberikan segala bentuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 antarlain Kartu Prakerja, BKH, BLT, dan Sembako. Mekanisme penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena COVID-19 dan belum mendapatkan apapun dari kebijakan pemerintahjadi yang belum dapat BKH, Bantuan Pangan No Tunai, dan segala bentuk kebijakan dari jaring pengaman sosial yang ada. Dan siapa yang melakukan pendataan, yang mendata adalah relawan Desa lawan COVID-19 yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa dan diketahui langsung oleh kepala Desa dimana basis pendatannya adalah RT (Rukun Tetangga) masing-masing RT diupayakan minimal di data 3(tiga) oraang relawan desa kenapa di data 3 (tiga) orang karena, ini pendataan baru meskipun merujuk pada DKS karena yang di data adalah keluarga miskin akibat kehilangan mata pecaharian maka di buka pendefisian miskin maka indikatornya adalah kehilangan mata pencaharian.

Pendataan di lakukan oleh 3 (tiga) orang supaya kesamapahaman antara lebih 1 (satu) orang bahwa keluarga itu benar-benar miskin kalau sudah di sepakati oleh 3 (tiga) orang pendata dimana 3 (tiga) orang pendata itu adalah warga asli Desa Pengalangan tentu pasti sangat paham tentang karakteristik warga itu maka dari itu, di data oleh 3 (tiga) orang.

Tahapan pendataan dari pendataan RT (rukun tetangga) oleh relawan Desa lawan COVID-19 I bawah ke forum yang namanya MUSDESUS (musyawara desa khusus) untuk di lakukan ferifikasi dan falidasi data supaya tidak ada pihak-pihak masyarakat tidak di ajak di dalam membangun dan memutuskan siapa yang berhak menerima BLT Desa dan setelah di sepakati di forum MUSDESU baru di sepakati oleh Kepala Desa. Penetapan penerimaan BLT di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti tiap RT yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 20 (dua puluh) orang dan besar BLT yang sudah di terima oleh masyarakat Desa Pengalangan sebesar Rp 600.000 (enem ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupia) selama tiga bulan.

Kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Pengalangan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT Desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) yang di lakukan oleh Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupten Gersik pada masa pandemi COVID-19 sehinga dalam penelitian ini penulis memilih judul **“Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Kepada Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19”**.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handyaningrat (1985:38) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Audit Commision dalam Mahsun (2006:180) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Kemudian, Peter Drueker dalam Handoko (2001:7) mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Mahsun (2006:182) menjelaskan

bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Dunn (2000:429) menerangkan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneterinya. Selanjutnya, Dunn (2000:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris "*programe*" yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu. Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli: pertama, Pariata Westra dkk. (1989:236) mengatakan bahwa: "Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya" Sondang P. Siagian (2006:1:17). "Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan" Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: pertama, program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program. Kedua, program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran. Ketiga, program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dalam kegiatan lain usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
- f. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan.

Efektivitas Program

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan,1998). Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan,

diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Pencapaian Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantuan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.

Bantuan langsung tunai pertama kali diciptakan di Brasil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia. Program ini sifatnya adalah

bantuan langsung tunai bersyarat yang diprakarsai oleh Luiz Inácio Lula da Silva, presiden Brasil ke-35. Bolsa Familia masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, sehingga program ini ditiru negara-negara lain. Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil pada saat mendaftar. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 2,4 juta keluarga miskin, dan telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub daerah dengan jumlah telah menyentuh 816.000 keluarga miskin.

Metode

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini adalah untuk memahami fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam satu konteks khusus alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong, 2004:6). Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *evaluative*. Menurut Muhajir (2003:209) dikatakan bahwa penelitian *evaluative* adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan dari sebuah kebijakan, pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program telah tepat sasaran (*feasible*) atau tidak. Dalam penelitian *evaluatif* diharapkan dapat memberikan keterangan seberapa jauh penyimpangan yang di lakukan obyek dan subyek dalam sebuah penelitian. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian *ekspos facto* yaitu penelitian yang mana data dikumpulkan setelah semua kegiatan dipersoalkan.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Dalam mengukur Efektifitas program Budiani 2017 dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program benar pada target yang telah ditentukan.
- b. Sosialisasi program, kemanapun program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat luas dan sasaran kepada peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program, tujuan program yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, pemantauan program merupakan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (Budiani 2011).

Pembahasan

Dahulu kala ada sebuah kisah panjang di bawah ini, yaitu bermula dari nama tempat kantor pemerintahan pada masa pemerintahan Sunan Giri. Di kawasan yang terkenal dengan

Masjid besar Al-Ishlah ini pernah menjadi salah satu pusat kekuasaan raja yang disebut Bangsal, yaitu sebuah kompleks perkantoran tempat raja bekerja menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sebagai pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Di kompleks ini raja menerima tamu negara, memimpin rapat para menteri, menerima persembahan upeti-upeti dan hadiah, menjatuhkan keputusan-keputusan hukum dan sebagainya. Sejarah nama Menganti (nama kecamatan dari Desa Pengalangan), bisa dimaknai terkait dengan nama salah satu kantor raja, yaitu Bangsal Sri Manganti. Dalam sistem pemerintahan tradisional Jawa kuno, keberadaan seorang raja berkedudukan sebagai lambang negara pemegang kekuasaan yudikatif dan legislatif, selalu didampingi oleh pejabat patih (perdana menteri) selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan dan pengelola administrasi negara. Suatu hari Raja tersebut berjalan menyusuri timur dari wilayah tempat tinggalnya, banyak dijumpainya lahan kosong atau juga biasanya oleh penduduk jauh sering disebut sebagai hutan panjang.

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik.

Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pengalangan. Dengan Menggunakan indikator untuk menilai efektivitas di gunakan teori Budiani (2007) diantaranya yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan program.

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menganalisis mengenai ketepatan sasaran program indikatornya adalah masyarakat. Masyarakat yang menjadi target utama adalah masyarakat yang bisa disebut sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam mengukur bagaimana kesesuaian program kelompok sasaran atau KPM. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Surat Keputusan Direktur Jendral Fakir Miskin No 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas keputusan Direktur Jendral Fakir Miskin No 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dalam penanganan dampak Covid-19. Di desa pengalangan Kecamatan Menganti ketepatan sasaran program sudah dijalankan dengan teknis yang telah ditentukan sejauh mana disampaikan oleh Kepala Desa Pengalangan

Bapak Ahyar Abdul Mutholib 02/08/2021 yang menyatakan *untuk menentukan yang berhak menerima bantuan BLT-DD ini tentunya dilakukan musyawara desa yang di hadiri oleh RT, RW, Kepala Dusun, Toko Agama, Toko Masyarakat. Di sana kita menentukan bahwa siapa-siapa yang berhak mendapatkan BLT ini dari anggaran Dana desa. Syarat yang utama untuk mendapat bantuan BLT ini adalah mereka-mereka yang terdampak karena covid-19 ada warga yang di PHK dari tempat kerja pedagang juga para petani. Dari persyaratan itu RT, RW, bersama kepala dusun pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah seratus empat puluh penerima BLT untuk desa pengalangan Jadi untuk peroses siapa yang berhak menerima BLT dari warga desa pengalangan ini.*

Untuk memperkuat pernyataan dari Kepala Desa selanjutnya ketua RT 09 Dusun Pengalangan Bapak Kasring juga mengatakan *Untuk pendataan ya mas kalau kita acak semua itu kan banyak yang kaya dan ada yang miskin kita data yang miskin terus juga janda yang miskin di ambil enem itu aja. Untuk keriteria ya mas keluarga tidak mampu, orangnya nga kerja karena di PHK dari tempat kerja.*

Disampaikan juga oleh Kepala Dusun Wongso Wetan Bapak Ahmad Sali .27/07/2021. Yang menyatakan *Ya Alhamdulillah ya masya kita melakukan musyawara antara RT, RW, Dusun, bersama toko masyarakat, terus kami rapat tiap dusun masing-masing RT, RW, toko masyarakat itu mencari yang betul-betul orang yang tidak mamapu sekaligus orang yang tidak menerima beras, sembako itu tidak menerima BLT, ditempat saya semuanya dapat bantuan ini mas cuman yang punya mobil yang ngak dapat bantuan ini. Untuk keriteria yang menerima ya mas ya, orang yang tidak mamapu kita lihat sehari-harinya itu dia kerja apa walaupun rumahnya mewah kalau rondo nga ada yang menafkahi itu juga dapat mas.*

Disini juga ada penjelasan dari Bapak Matrais selaku Kesra Desa Pengalangan 02/08/2021. 10:30, yang menyatakan *Calon penerima BLT DD ya mas dari semua usulan dari RT, RW, Kepala Dusun di usulkan bahwa yang menerima BLTDD masyarakat yang terdampak akibat pendemi Covid-19 dan yang tidak mamapu juga tidak menerima bantuan Sembako,BST dan BKH. Disini Peneliti menyimpulkan bahwa dari tahap pendaftaran calon penerima program BLT sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.*

2. Sosialisasi Program

Sebagai langkah awal ketika akan dilaksanakan suatu program tentunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Yang artinya masyarakat diberi informasi tentang program BLT pada masa pandemi Covid-19 tersebut. Proses sosialisasi dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui jelas apa makna dan tujuan dari program tersebut. Aspek ini dapat mengukur bagaimana pemahaman pemerintah terkait program BLT dan pemahaman oleh masyarakat penerima program tersebut.

Di desa Pengalangan Kecamatan Menganti mengenai sosialisasi program BLT sudah dilakukan sesuai prosedur dimana sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Pengalangan Bapak Ahyar Abdul Mutholib yang menyatakan *Untuk programnya tentunya di sosialisasikan kepada penerima begitu pentingnya penggunaan uang negara untuk bisa menyambung kehidupan sehari-hari tentunya dalam masalah pangan. Alhamdulillah dari tahap pendataan sampai penerimaan BLT ini nga ada kendala.*

Pernyataan ini juga diperkuta oleh Bapak Bapak Kasring 01/08/2021 ketua RT 9 RW 3, yang menyatakan *Untuk programnya mas pasti di sosialisasikan ada rapat desa sama pa lurah di sosialisasikan pas penerima di balai desa, kalau sosialisasi di lakukan pas penerima takutnya ada kontraversi mas.*

Mba Marta Penerima BLT 01/08/2021. 11:16, Menyatakan bahwa yang melakukan pendataan kemarin pa kasun sama pa RT, di minta mengumpulkan KTP sama KK mas, yang saya lihat kemarin disini ya mas ya yang menerima itu banyak keluarga kurang mampu sama yang janda-janda mas. Kalau sosialisasi itu ia mas.

Di jelaskan juga oleh Bapak Karnadi Penerima BLT 18/07/2021. 09:16 WIB, *Untuk uang bantuannya mas saya sudah dapat tiga kali enam ratus ribu itu to mas, lantas itu nga dapat lagi mas. Yang ke sini kemarin itu mas Pa RT, sama kepala dusun cuman minta KTP sama KK mas. Kalau untuk pengambilan uangnya mas dikantor desa dengan membawa kartu yang di berikan oleh pa RT Mas. kalau untuk sosialisai mas itu sudah dilakukan sama Pa kasun,*

Di sini juga disampaikan oleh Bapak Matrais selaku Kesra Desa Pengalangan 02/08/2021. 10:30 *Sosialisasi ia cuman kalau nga ada sosialisasi nga mungkin RT,RW mendata warganya Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk sosialisasi*

programnya sudah dilakukan sebagaimana telah dilaksanakan oleh pihak pendata penerima program BLT baik dari tingkat RT, RW, Kepala Dusun.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dari tahap sosialisasi program sudah dilaksanakan oleh pihak RT, RW, dan Kepala Dusun sebagai mana mereka yang bertugas mendata serta mensosialisasikan program ini kepada penerima program BLT.

3. Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam aspek tujuan penulis ingin mengetahui pelaksanaan program BLT di desa pengalangan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Tujuan dari program BLT ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian melalui data skunder dan melakukan wawancara dengan informan total penerima bantuan langsung tunai dana desa desa pengalangan berjumlah 142 kepala keluarga. Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Rinciaan Penerima BLT Dana Desa di Desa Pengalangan

No	Jumlah Penerima	Tahap 1(Rp)	Taha II (Rp)
1. 142	Rp. 600.000	Rp. 300.000	
2. 142	Rp. 600.000	Rp. 300.000	
3. 142	Rp. 600.000	Rp. 300.000	

Data Penerima BLT Dana Desa Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupten Gersik

Selanjutnya penulis memwancarai informan yang menerima program BLT sebagaimana dikatakan oleh Bapak Mahruf Arif penerima BLT 01/08/2021. 11:18 WIB. *“yang saya terima mas tiga kali enam ratus yang tiga ratus tiga kali sampe sa iki mas nga terimo mane, yang kesini kemarin itu Pa Rt sama Kepala dusun, di minta KTP sama KK. Untuk Penerimaan uangnya kemarin itu terima di balai desa pengalangan mas dengan membawa foto copi KK sama KTP. Ia jujur ya mas ya dengan program ini kemarin cukup terbantu sedikit untuk meneutupi utang mas ya gimana lagi mas nga ada kerjaan gini utang dulu kalau ada uang baru di bayar”*.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sunensi penerima BLT 18/07/2021. 09:30 “*Saya sudah terima uangnya mas terima pertama le ngak sala enem ratus tiga kali, mari ngono oleh mane telung ngatus (tiga ratus) wes sampe sa iki nga dapat lagi mas*”.

Mba Marta Penerima BLT 01/08/2021. 11:16 “*Saya menerimanya kemarin yang enem ratus tiga kali dan tiga ratus tiga kali mas itu terimanya pada awal Covid-19 tahun 2020*”. Juga di sampaikan oleh Ibu Wulandari Penerima BLT 01/08/2021. 12:00 WIB. “*Saya sudah dapat tiga kali yang enem ratus sama tiga ratus tiga kali sampe sekarang nga dapat lagi, yang kesini kemarin yang minta datanya Pa dusun sendiri suruh kumpulkan KTP sama KK. Penerimaanya kemarin itu di balai desa suruh bahwa foto copi KTP sama KK. Ia mas di sosialisasikan ia mas untuk bantuan BLT ini cukup terbantu apalagi saya janda nga ada pekerjaan*”.

Disampaikan juga Oleh dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa untuk tujuan dari program ini sudah di jalankan sebagaimana prosedur yang telah di tentukn oleh pemerintah pusat dan sudah terealisasi dengan baik oleh pemerintah desa pengalangan.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program BLT kepada penerima program merupakan salah satu langkah dari pihak Pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota beserta Kecamatan ikut melakukan pemantauan program ini di tingkat Desa untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksanakan dengan baik serta untuk memastikan bahwa bantuan berupa uang ini sudah diterima atau belum. Untuk pemantauan program sendiri sudah di lakukan sebagai mana pernyataan dari Bapak Ahyar Abdul Mutholib selaku Kepala Desa Pengalangan yang menyatakan *Kami melaksanakan program ini dari pemerintah pusat betul-betul terealisasi dengan apa yang di musyawara desa, jadi tidak ada penyelewengan dari penerima, yang terdapat bantuan BLT ini hasil dari musyawara desa jadi merekalah yang menerima program BLT ini. Kalau pemantauan penyaluran program ini dari pihak Babinsa ada juga dari pihak kecamatan yang menjadi tangan kanan dari kabupaten.*

Disini juga ada pernyataan dari Bapak Bapak Matrais Jabatan Kesra 02/08/2021. 10:30 “*yang melakukan pemantauan program ini ada BPD serta toko masyarakat yang ikut dalam mengawasi program BLT ini*”. Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa

pemantauan program ini sudah di lakukan sebagaimana telah di sampaikan oleh Kepala Desa bapak Ahyar Abdul Mutholib bersama bapak Bapak Matrais selaku Kesra Desa Pengalangan.

Penutup

Pada bab ini peneliti akan menyimpulkan dan menganalisis temuan di lapangan dari hasil wawancara dan observasi yang telah di jelaskan pada bab IV mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gesik. Dimana program Bantuan Langsung Tunai tersebut diberikan oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat yang kehilangan mata pecaharaian selama masa pandemi berlangsung. Program Bantuan Langsung Tunai ini adalah berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 600.000 / KK Pada tahap 1, dan pada tahap 2. Senilai Rp. 300.000/ KK. Tentunya untuk memperoleh Bantuan BLT ini masyarakat yang berhak menerima program ini juga harus melalui proses verifikasi serta validasi data proses ini bersifat nasional, karena harus melalui pihak RT, RW, Kepala Dusun dan data inipun dibawah ke MUSDESU (Musyawara Khusus Desa) dilakukan sinkronisasi data.

Dalam rangka penanganan dampak Covid-19 khususnya dampak ekonomi, Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari Dana Desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya Peneliti akan mengkaitkan temuan tersebut dengan terori-teori yang telah dijelaskan pada bab II mengenai efektifitas menurut (Budiani 2017) dalam mengukur efektifita program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel: Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan Program, Pemantauan Program.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik dapat diambil kesimpulan Efektivitas dari Program tersebut dapat dilihat dari:

- a. Ketepatan Sasaran Program, dimana program Bantaun Langsung Tunai (BLT) di desa pengalangan sudah tepat sasrana dan yang menerima BLT ini benar-benar masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Terbukti dari hasil observasi peneliti dilapangan.
- b. Sosialisasi Program, untuk sosialisasi program sendiri sudah dilakukan oleh pihak RT, RW, bersama Kepala Dusun sebagaimana telah dijelaskan oleh Kepala Desa Pengalangan, RT dan Kepala Dusun serta pernyataan dari masyarakat meneima BLT.

- c. Tujuan Program, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ada untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19 khususnya dibidang ekonomi, program ini sudah di jalankan di Desa Pengalangan sesuai intruksi dari Pemerintah Pusa. Terbukti dari hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan.
- d. Pemantauna Program, berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan bahwa pemantun program sendiri sudah dilakukan sebagaimana telah dijelaskan oleh Kepala Desa Pengalangan bersama Kesra.

Daftar Pustaka

- Asmanto,2020.” Ringkasan Kebijakan Pengguna Dana Desa: bantuan Langsung Tunai Desa Unit Riset, TNP2K.
- Bintarto. R. Dr.1983. Interaksi Desa-Kota. Yokyakarta: Gahalia Indonesia.
- Edi. Suharto. (2007:142) Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Firman, 2020. Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesian Jurnal of Educational Science, 2(2),81-89.
- Gisbon, 1984 “Organisasi dan Manajemen” Perilaku, Struktur Dan Proses. Edisi keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gie, The Liang, 2020 Administrasi Perkantoran Modern Yogyakarta Liberty.
- Indrayani, F. K. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *Publika*, 2(3).
- Lumansik, D. P., Lengkong, F. D., & Plangiten, N. (2019). Efektivitas Sistem Birokrasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84).
- Maun, C. E. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. JURNAL POLITICO*, 9(2).
- Mukhtar, 2013 Metode Praktis Penelitian deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Grab.
- Makmur, 2011 Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo,2004 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yokyakarta: Andi.
- Ndrah, Talizid, (1998) Dimensi-Dimensi Pmerintah Desa, Jakarta: PT.Bina Aksara.

- Oscar Lewis 2006, *pembangunan Pertanian dan Permasalahannya*, PT Pradnya Paramita Jakarta.
- Parapat, A, 2020 Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini, Mahasiswa dan Praktek Pendidik Anak.
- Wilantara, I. W. (2020). *Pendamping Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa* (Doctoral Dissertation, Universitas Tadulako).
- Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wynandin Imawan (2008:8) Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008. Bapenas, Jakarta.
- Wynandin, 2008, Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta.
- Yunus, 2020 Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19.

Sumber Lain:

- Peraturan Manteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan manteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.
- Peraturan menteri desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penaganan Pandemi corona virus Disease Covid-19 dan/atau Dalam Rangkak menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomiaan Nasional dan Stabilitas Sitem Keuangan.
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- <http://setkab.go.id/>
- <http://tnp2k.go.id/>